

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Pendidikan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019. Laporan kinerja merupakan bagian dari upaya Dinas Pendidikan dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membantu Gubernur Riau, menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan. Laporan Kinerja tahun 2019 merupakan laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tahun akhir untuk periode perencanaan sesuai Perubahan Renstra tahun 2014-2019. Laporan kinerja ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja tahun 2019 Dinas Pendidikan. Selain capaian kinerja tahun 2019, laporan juga dilengkapi dengan analisis tingkat pencapaian tahun 2019 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis tahun 2014-2019 Dinas Pendidikan.

Tahun 2019 Dinas Pendidikan melaksanakan tujuh program pembangunan pendidikan. Melalui kerja keras dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, secara umum Dinas Pendidikan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dengan baik. Dinas Pendidikan sadar meskipun telah banyak capaian yang dihasilkan namun tantangan pembangunan di bidang pendidikan masih banyak dan memerlukan kerja lebih keras pada tahun–tahun mendatang.

Tantangan seperti memperbaiki layanan pendidikan bermutu sesuai dengan SPM dan SNP, membentuk insan Indonesia yang berkarakter dan beradab, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan disemua jenjang

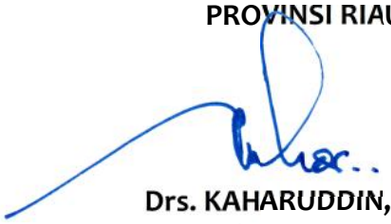
pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidikan. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, diharapkan tantangan dan masalah yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberi gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan selama tahun 2019. Selain itu, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam perbaikan perumusan kebijakan bidang pendidikan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja tahun 2019 Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Pekanbaru, April 2020

PLt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU



Drs. KAHARUDDIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196440310 198702 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR GRAFIK vii

DAFTAR LAMPIRAN vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN 1

C. DASAR HUKUM 2

D. GAMBARAN UMUM 2

E. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI 4

F. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASAHAN 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

1. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2015-2019 13

1. Visi dan Misi Gubernur Riau 13

2. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Sesuai Perubahan Renstra Tahun 2015-2019 14

2. RENCANA KERJA TAHUNAN 15

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 15

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25

A. METODE PENGUKURAN KINERJA DAN PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 25

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 26

C. REALISASI ANGGARAN 51

BAB IV PENUTUP 57

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan 3

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan 3

Tabel 1.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan 4

Tabel 2.1 Target Kinerja Dinas pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019 15

Tabel 2.2 Program dan Bidang 16

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas PendidikanTahun 2019 17

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Eselon III Tahun 2019 17

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Eselon IV Tahun 2019 21

Tabel 2.6 Program dan Pagu Dana Tahun 2019 23

Tabel 2.7 Matriks Indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Thn 2015-2019 ... 21

Tabel 3.1 Skala pengukuran dan predikat kinerja 25

Tabel 3.2 Target, Realisasi dn capaian Kinerja APK SMA/ SMK/ MA/ SMALB/ Paket C 27

Tabel 3.3 Perbandingan Perkembangan APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014 – 2019 28

Tabel 3.4 APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2019 29

Tabel 3.5 APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2019 31

Tabel 3.6 Perbandingan Perkembangan APM Sekolah Menegah Sederajat Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014 – 2019 31

Tabel 3.7 APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2019 33

Tabel 3.8 Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu pendidikan Tahun 2019 34

Tabel 3.9 Analilis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 38

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya Aksesibilitas dan mutu pendidikan yang mendukung sasaran RPJMD 39

Tabel 3.11 Perkembangan rata-rata lama skolah (RLS) Kab/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2014-2019 40

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.12 Perkembangan Harapan lama skolah (HLS) Kab/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2014-2019 41

Tabel3.13 Capaian Kinerja Eselon III Tahun 2019 Sekretaris Dinas pendidikan Provinsi Riau 42

Tabel3.14 Capaian Kinerja Eselon III Tahun 2019 Kepala Bidang SMA pendidikan Provinsi Riau..... 43

Tabel3.15 Capaian Kinerja Eselon III Tahun 2019 Kepala Bidang SMK pendidikan Provinsi Riau..... 46

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Eselon III Tahun 2019 Kepala Bidang PKPLK pendidikan Provinsi Riau..... 48

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Eselon III Tahun 2019 Kepala Bidang PKPLK pendidikan Provinsi Riau..... 49

Tabel 3.18 Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Pendidikan Tahun 2019..... 52

Tabel 3.19 Rekapitulasi Capaian Kinerja Keuangan Dana Dekonsentrasi (APBN) Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019 55

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kinerja Sasaran Meningkatnya Aksesibiltas dan Mutu Pendidikan Tahun 57

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau 12

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1 Perbandingan Perkembangan APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014– 2019 28

Grafik 3.2 APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau Tahun 2019..... 29

Grafik3.3 Perbandingan Perkembangan APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014– 2018 32

Grafik 3.4 APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2019..... 33

Grafik 3.5 Persentase Nilai Akreditasi SMA se Provinsi Riau Tahun 2018..... 42

Grafik 3.6 Persentase Nilai Akreditasi SMK se Provinsi Riau Tahun 2018 43

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RINomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dalam rangka pemenuhan dari ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada alinea pertama di atas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Untuk mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. DASAR HUKUM

Landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019 adalah:

1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
7. Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

D. GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Sumber Daya Manusia merupakan modal yang paling berharga serta merupakan aset yang paling penting dan sangat diperhatikan dalam organisasi. Hal ini karena kinerja suatu organisasi dapat dipengaruhi oleh kualitas SDM yang ada. Sumber daya manusia/personil di Dinas Pendidikan terdiri dari 7.935 pegawai termasuk guru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Kondisi Pegawai berdasarkan Jabatan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PNS BERDASARKAN							
		STRUKTURAL				JUMLAH	FUNGSIONAL TERTENTU	STAF	JUMLAH
		I	II	III	IV				
1	Laki-laki		1	5	17	23	2777	74	2851
2	Perempuan				2	2	4997	87	5084
TOTAL PNS						25	7774	161	7935

(sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diketahui bahwa PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau didominasi oleh jabatan fungsional tertentu yaitu guru dan pengawas sebanyak 7.774 orang, jabatan staf 161 orang dan Jabatan Struktural sebanyak 25 orang.

Tabel 1.2
Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan

No	JENIS KELAMIN	JUMLAH PNS BERDASARKAN									
		TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D-I	D-II	D-III	S1	S2	S3	
1	Laki-laki	11	15	180	2	2	55	2116	462	6	2849
2	Perempuan	2	4	225	4	8	71	4310	457	5	5086
TOTAL PNS		13	19	405	6	10	126	6426	919	11	7935

(sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Dari data pada tabel 1.2 diketahui bahwa pendidikan PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata1 (S.1) yang berjumlah 6.426 orang dan SMA/Sederajat berjumlah 405 orang. Jika dilihat dari PNS yang memiliki tingkat pendidikan S2 dan S3 adalah sebanyak 930 orang dari seluruh PNS Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hal ini menggambarkan tingkat pendidikan pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah cukup baik.

Tabel 1.3
Klasifikasi Pegawai menurut Golongan

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PNS BERDASARKAN GOLONGAN I				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	18	184	1710	937	2849
2	Perempuan	2	215	3471	1398	5086
	TOTAL PNS	**20**	**399**	**5181**	**2335**	**7935**

(sumber data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau)

Berdasarkan data pada tabel 1.3 diketahui bahwa PNS pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 5.181 atau sedang golongan terkecil adalah golongan II yang berjumlah 399 orang.

E. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas dan Fungsi. Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1) Tugas Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Dinas Pendidikan bertugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
   a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, sidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;
   b. Pelaksanaan kebijakan pada sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan

d. Pelaksanaan administrasi pada sekretariat, Bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas:
   a. Kepala Dinas
   b. Sekretariat, terdiri atas:
      1. Subbagian Perencanaan Program
      2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang milik Daerah; dan
      3. Subbagian Kepengawaian Umum
   c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
   d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
   e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan Khusus.
   f. Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan.
   g. Cabang Dinas.
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
3. Bidang dibantu oleh Pelaksana/ Pejabat Fungsional.
4. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Kepala Dinas Pendidikan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a)

6. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
7. Kepala Subbagian merupakan Penjabat Pengawas (eselon lV.a).

3) Tugas dan Fungsi sesuai susunan organisasi

1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pcmerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang pendidikan**.**
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, peLaksanaan evaluasi dan pelaporan, peleksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan.
3. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencaaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
   a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat.
   b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat.
   c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporen pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
   d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya
5. Kepala Subbagian Perencanaan Program Mempunyai Tugas :
   a. merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program.
   b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkurrgan Subbagian Perencanaan Program.
   c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program / kegiatan dari masing masing bidang.

d. melaksanakan penyusunan rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja.
e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur.
f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis.
g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program dan;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, mempunyai tugas :
   a. Merecanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
   b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan PengeloLaan Barang MiLik Daerah.
   c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset.
   d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai.
   e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset.
   f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah.
   g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Pendidikan.
   h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran dala hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan.
   i. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi.
   j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungJawaban anggaran.
   k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset.
   i. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja.

l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaa tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuail tugas dan fungsinya.

7. Kepala Subbagian Kepengawaian dan Umum Mempunyai Tugas :
   a. Merencanakan program / kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum.
   b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
   c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat.
   d. Melaksanakan fasilitasi administrasj kepegawaian.
   e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pengawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan.
   f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai.
   g. Membuat laporan perkembangan kepengawaian.
   h. Menyelenggarakan urusan kehumasan.
   i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi.
   j. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanaan dinas.
   k. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
   l. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat.
   m. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
   n. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum dan
   o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

   a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau.

   b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi :

   - penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
   - penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
   - menyusun bahan perumusan koordinasi pencapaian kurikulum, pembinaan, permantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kurikulum dan pembangunan karekter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas.
   - menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Atas.
   - penyelenggaraan pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan,
   - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

   a. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

   b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan menyelenggarakan fungsi.

      - penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
      - penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

- menyusun bahan perumusan koordinasi, pembinaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pembangunan karakter peserta didik, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- menyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Kejuruan.
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan peLaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan,
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

10. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan dan Pendidikan Layanan Khusus.
    a. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus mcmpunyai tugas melakukan, koordinai, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/kota se Provinsi Riau.
    b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan Khusus menyelenggarakan fungsi :
        - penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan layanan Khusus;
        - penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
        - menyusun bahan perumusan koordinasi, pembinaan, serta kelembagaan dan sarana prasarana, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pembangunan karakter peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
        - menyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Pendidlikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
        - penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan,

- pelaksanaan tugas kedinasan Iain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

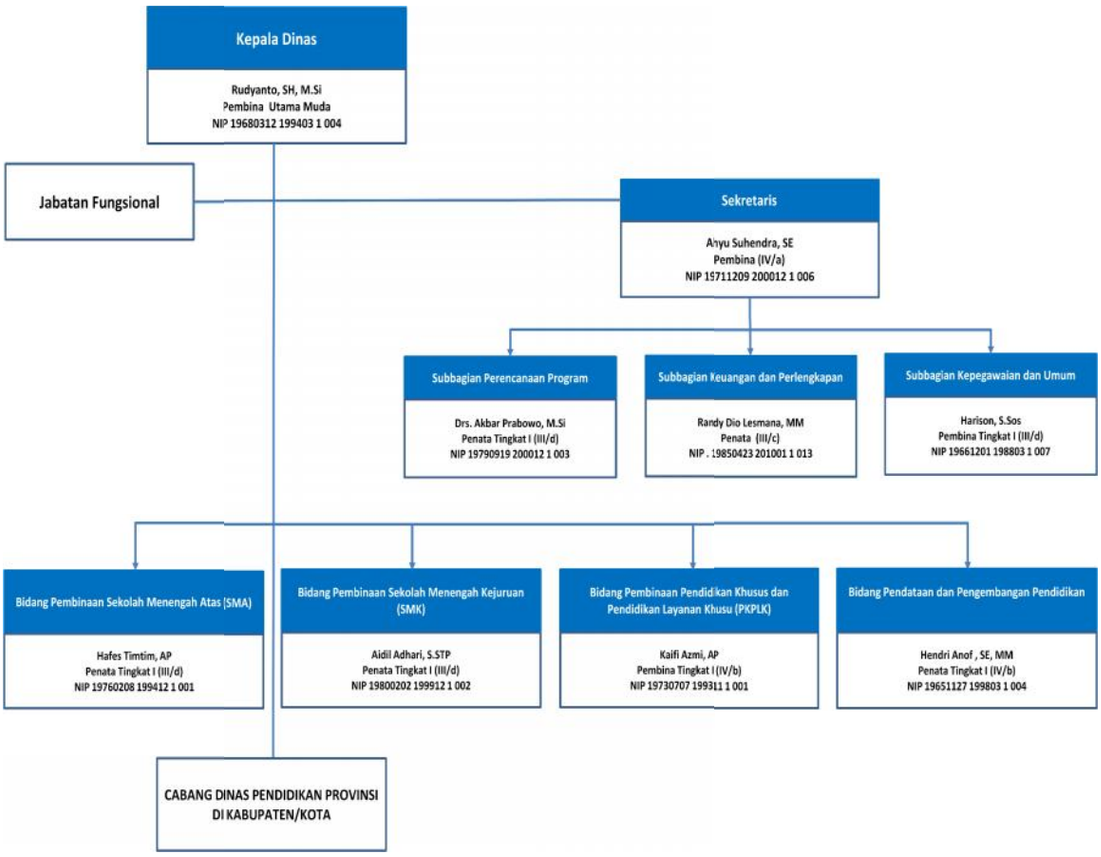
11. Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan

a. Kepala Bidang Pendalaan dan pengembangan pendidikan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Cabang Dinas pendidikan di Kabupaten/kota se Provinsi Riau

b. Untuk melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pendataan dan pengembangan Pendidikan menyelenggaraan fungsi;

- penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pendataan dan pengembangan Pendidikan;
- penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pendataan dan Pengembangan pendidikan;
- menyusun bahan perumusan koordinasi, analisis, sinkronisasi dan neraca pendidikan daerah pelaksanaan kebijakan pengelola data pendidikan, Pengembangan Kebijakan pendidikan dan fugas pembantuan, fasililasi dan kerjasama pendidikan;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, pembangunan dan kebijakan perencanaan, pembangunan dan pengembangan pendidikan, serta pelaksanaan tugas pembantuan, fasilitasi dan kerjasama pendidikan;
- melakukan penyebarluasan informasi dan pokok pendidikan dan profil pendidikan Provinsi Riau;
- menyusun kelender pendidikan;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau



F. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan dan antara lain adalah pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), peningkatan akses dari jenjang pendidikan menengah, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan khususnya penyediaan sarana dan prasana di daerah tertinggal, terdepan dan terpencil, penyebaran guru yang belum merata.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dengan adanya perencanaan kinerja ini maka konsepsi organisasi menjadi jelas dan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta dapat mengarahkan sumber-sumber organisasi secara efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan kinerja dapat menentukan keberhasilan organisasi.

Pemerintah Provinsi Riau mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dari Pemerintah Kabupaten/kota. Hal itu merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sehingga Pemerintah Provinsi Riau mePerubahan RPJMD dan mengacu pada perubahan RPJMD, Dinas pendidikan melakukan Perubahan Renstra untuk Periode Tahun 2015-2019.

1. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2015-2019

Adapun komponen-komponen Perubahan RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Riau tersebut, antara lain dapat digambarkan seperti dibawah ini :

1.1. Visi dan Misi Gubernur Provinsi Riau.

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Riau terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan Provinsi Riau sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Riau yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Provinsi

Riau. Perumusan visi pembangunan jangka menengah tahun 2014-2019 mempedomani visi RPJPD Provinsi Riau 2005-2025, adapun visi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 adalah :

“ Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang mapan dan Pengembangan Budaya Melayu secara Proporsional melalui Kesiapan Infrastruktur dan Peningkatan Pembangunan Pendidikan dalam Masyarakat yang Agamis “

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan visi Provinsi Riau 2014-2019 maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 meliputi :

Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur.

Misi 2 : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan.

Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan.

Misi 4 : Menurunkan Kemiskinan.

Misi 5 : Mewujudkan Pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik.

Misi 6 : Pembangunan Masyarakat yang berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa.

Misi 7 : Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan.

Misi 8 : Meningkatkan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata.

Misi 9 : Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan.

Mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Riau melaksanakan misi kedua Gubernur Riau, yaitu : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan.

1.2. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Sesuai Perubahan Renstra Tahun 2015-2019.

Tujuan Dinas Pendidikan menurut perubahan Renstra Tahun 2015-2019 yaitu meningkatkan Pemerataan akses dan mutu Pendidikan. Sasaran Dinas Pendidikan yaitu Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan dengan strategi Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan Mutu Pendidikan.

Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan menurut Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan
2. Meningkatkan mutu layanan pendidikan
3. Meningkatkan kesesuaian layanan pendidikan dengan lapangan pekerja
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pendidikan
5. Meningkatkan tata kelola manajemen layanan pendidikan

2. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2015-2019 yang setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2019 seluruhnya ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT/RENJA) 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusuan Penetapan kinerja dan Pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Adalah Sebagai berikut.

Tabel 2.1

Target Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja sasaran pada Tahun 2019
1	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	84.96
			APM SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	61.59
			Angka Rata-rata Lama Sekolah	8.89
			Angka Harapan Lama Sekolah	13.22

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan tahun 2015-2019 dan sumber daya anggaran (murni) yang ada, Disdik telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2019. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator

kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 tersebut, Disdik Provinsi Riau mengalokasikan total penganggaran dari APBD (anggaran murni) sebesar **Rp.919.535.818.171.-** Untuk membiayai 7 Program baik program non urusan maupun urusan wajib. Dengan adanya perubahan kewenangan urusan Pengelolaan Pendidikan, Dinas Pendidikan pada tahun 2019 melaksanakan 7 (tujuh) program, terdiri dari 3 (tiga) program non urusan dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.586.573.400,- , 4 (empat) program urusan wajib, dengan alokasi dana sebesar Rp.908.949.244.771,- dan ke 7 program tersebut dilaksanakan oleh bidang dan sekretariat di lingkungan Disdik Provinsi Riau. Selain menjalankan 7 program sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pendidikan juga menjalankan 3 (tiga) program dengan sumber dana dari APBN Tahun 2019 sebesar Rp.6.218.424.000,. Adapun program, pelaksana program dan alokasi dana secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.2
Program dan Bidang

No	Program	Bidang
Program Non Urusan		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Sekretariat
Program Urusan Wajib		
4	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan Menengah
5	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	PKPLK
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendataan
7	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	SMA
Program dengan dana APBN		
1	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	SMA, SMK dan PKLK
2	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	Pendataan dan pengembangan pendidikan

No	Program	Bidang
3	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	Sekretariat

Isi dari perjanjian kinerja tahun 2019 Dinas Pendidikan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	ANGGARAN (Rp)
	(1)	(2)		(3)	(4)
1.	**Meningkatkan Mutu dan Akses Pendidikan**	1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) :		**Rp.919.535.818.171.-**
			- SMA/ SMK/ MA/SMLB/Paket C	83.44%	
		2.	Angka Partisipasi Murni (APM) :		
			- SMA/ SMK/ MA/SMLB/Paket C	61.04%	

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Esselon III
Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
	SEKRETARIAT			
1	Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS), Jumlah penghasilan yang diterima oleh tenaga pendidik dan kependidikan	3 Kegiatan	463,678,400

No.	Sasaran	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
2	Meningkatnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Kegiatan	9,372,895,000
4	Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Sarana Pendidikan	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Jumlah Sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal	4 Kegiatan	964,000,000
5	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan,	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	6 Kegiatan	3,354,403,050
6	Meningkatnya Pengembangan Data/Informasi, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan	Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi, Persentase Jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik	1 Kegiatan	735,925,000
	BIDANG SMA			
7	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS)	6 Kegiatan	8,209,737,000

No.	Sasaran	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
8	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi	26 Kegiatan	731,271,586,735
	BIDANG SMK			
9	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah(MBS)	4 Kegiatan	6,052,334,100
10	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah	22 Kegiatan	160,233,024,110

No.	Sasaran	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
		SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi		
	BIDANG PKPLK			
11	Meningkatnya Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Terlaksananya Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	18 Kegiatan	44,392,524,000
	BIDANG PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN			
12	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi	1 Kegiatan	1,386,813,700
13	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS)	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS)	12 Kegiatan	53,904,969,000

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Esselon IV Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
UMUM				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 bulan	1,818,150,000
2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	880,920,000
3	Terlaksanaanya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	54,585,000
4	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	525,600,000
5	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman	11 Kab/Kota	500,000,000
6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi	Tersedianya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi	12 Bulan	1,180,340,000
7	Terlaksananya Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi	Tersedianya Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi	12 Bulan	113,300,000
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau di 11 Kab/Kota	Tersedianya Penyelenggaraan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau di 11 Kab/Kota	12 bulan	2,400,000,000
9	Terlaksananya Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi	Tersedianya Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi	12 bulan	350,000,000
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur				
10	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	200,000,000
11	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	374,000,000

No	Sasaran	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
12	Terlaksananya Penyediaan Sarana Kearsipan	Tersedianya Penyediaan Sarana Kearsipan	12 bulan	40,000,000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				
13	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau	Tersedianya Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau	12 bulan	500,000,000
14	Terlaksananya Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	Tersedianya Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	12 Kab/ Kota	138,914,500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
15	Terlaksananya Peningkatan Pelaksana Kerja Pengawas Sekolah	Tersedianya Peningkatan Sistem Manajemen SDM	12 Bulan	200,000,000
16	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Tersedianya Pendidikan Dan Pelatihan Formal	12 Bulan	73,678,400
17	Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani	Tersedianya Pembinaan Jasmani dan Rohani	12 Bulan	190,000,000
PERENCANAAN				
P**rogram Pelayanan Administrasi Perkantoran**				
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Tersedianya Penyediaam Jasa Administrasi Kantor	1 Dok	100,000,000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				
19	Terlaksananya Diklat Kompetensi Pemamfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Tersedianya Diklat Kompetensi Pemamfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	17.047 eks	735,925,200
20	TerlaksananayaPengadaan Kelender Pendidikan	Tersedianya Pengadaan Kelender Pendidikan	11.743 Eks	273,920,000
21	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Jurnal Karya Tulis Ilmiah	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Jurnal Karya Tulis Ilmiah	270 Orang	755,000,050
22	Terlaksananya Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	Tersedianya Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	12 Kab/ Kota	775,438,000
23	Terlaksananya Pencapaian SPM Pendidikan dan Pemantauan/Evaluasi SPM Pendidikan di Provinsi Riau dan Kab/Kota	Tersedianya Pencapaian SPM Pendidikan dan Pemantauan/Evaluasi SPM Pendidikan di	1 Tahun	750,000,000

No	Sasaran	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
		Provinsi Riau dan Kab/Kota		
24	Terlaksananya Diklat Muatan Lokal Bagi Guru SMA/SMK Se-Provinsi Riau	Tersedianya Diklat Muatan Lokal Bagi Guru SMA/SMK Se-Provinsi Riau	415 Orang	700,000,000
KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
25	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	600,000,000
26	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	12 Bulan	300,000,000
27	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Bulan	900,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
28	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	350,000,000

Tabel 2.6
Program dan Pagu Dana Tahun 2019

Dengan Program dan Pagu Dana sebagai berikut:

No	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,110,895,000	APBD
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1,012,000,000	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	463,678,400	APBD
4	Program Pendidikan Menengah	456,361,160,545	APBD
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	80,253,025,300	APBD
6	Program Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus	84,055,679,800	APBD
7	Program Bantuan Operasional Sekolah	288,279,379,126	APBD

No	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
8	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	4,852,584,000	APBN
9	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	996,062,000	APBN
10	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	369,778,000	APBN

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Penetapan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam perode lima tahunan merupakan penjabaran dari tujuan Dinas pendidikan Provinsi Riau dalam mendukung pencapaian misi 1 Gubernur Riau. Hasil yang dicapai merupakan ukuran tingkat keberhasilan Dinas pendidikan. Oleh Karena itu, rumusan Rencana strategis yang akan dicapai sesuai dengan indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Riau. Berikut adalah indikator Kinerja Utama Dinas pendidikan Provinsi Riau.

Tabel. 2.7
Matriks indikator kinerja utama
Dinas pendidikan Tahun 2015-2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Akses dan mutu Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/SMLB /Paket C	Jumlah Siswa SMA/MA/SMLB/Paket C / Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun *x 100%*	KEMENDIKBUD
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/SMLB /Paket C	Jumlah Siswa SMA/MA/SMLB/Paket C / Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun *x 100%*	KEMENDIKBUD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

A. METODE PENGUKURAN KINERJA DAN PENYIMPULAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Adapun cara melakukan pengukuran kinerja adalah dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan pertimbangan :

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi, menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{\% capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerja maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran dan prediket kerja

% Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
> 95% s/d 100%	Sangat Berhasil
> 80 s/d 95%	Berhasil
> 50 s/d 80%	Cukup Berhasil
< 50	Tidak Berhasil

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Riau yaitu **" Sasaran Strategis Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan ".**

Dalam meningkatkan Aksesibilitas dan mutu pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari beribagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Riau untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM periode sebelumnya. Untuk itu, sampai dengan tahun 2019 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan. Pembangunan pendidikan di Provinsi Riau senantiasa perlu terus ditingkatkan, agar dapat selaras dengan tiga pilar pembangunan pendidikan nasional.

a) Tingkat ketercapaian sasaran strategis Meningkatkan Aksesibilitas dan mutu pendidikan diukur/dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja utama yang ada dalam perjanjian kinerja, yaitu:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/PaketC.
2. Angka Partisipasi Murni (APM) MA/SMK/MA/SMLB/Paket C;

Adapun target dan pencapaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Sederajat

Indikator APK SMA/MA Sederajat digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah, dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 } - \text{ 18 Tahun}} X\ 100\%$$

Tabel 3.2
TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN KINERJA
APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018 (%)	Tahun 2019			Target Akhir Renstra Tahun 2019	Capaian terhadap Akhir renstra Tahun 2019
			Target (%)	Realisasi (%)	% capaian		
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	APK SMA / SMK/MA/ Paket C	82.54	84.96	86.65	101.99 %	84.96	101.99%

Meningkatnya Aksesibilitas dan mutu pendidikan menengah merupakan sasaran strategis untuk mendukung tercapaiannya tujuan tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui IKU " APK Provinsi SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C ".

Capaian Kinerja tahun 2019 sebesar 101,99%, jika dibanding dengan capaian tahun 2018 yaitu 88,36% terjadi peningkatan sebesar 13,63%, begitu juga dengan realisasi APK Sekolah Menengah sederajat mengalami kenaikan dari 82,54% di tahun 2018 meningkat menjadi 86,65% di tahun 2019.

Sesuai dengan target perubahan rencana strategis 2014-2019, pada tahun 2019 atau tahun terakhir periode perubahan rencana strategis 2014-2019 APK SMA/MA/SMK/SMLB/Paket C ditargetkan mencapai 84,96%. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2018 berhasil mencapai 82,54%. Dengan data capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis meningkatnya akses layanan pendidikan menengah pada tahun 2018 berhasil dicapai.

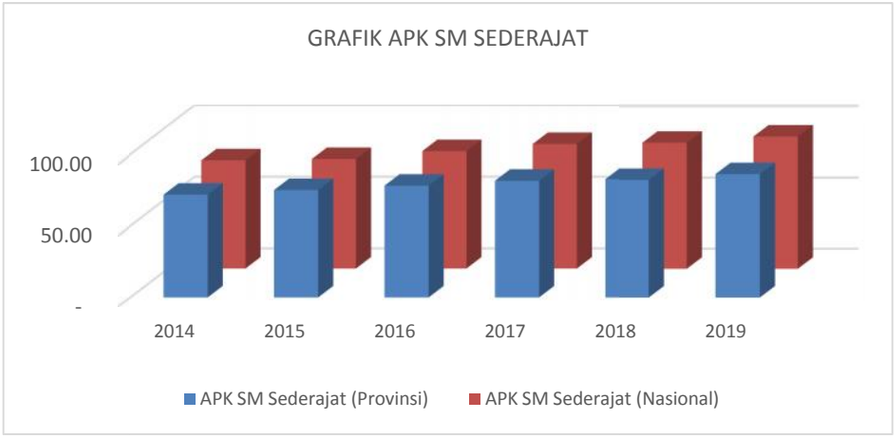
Berikut tren pencapaian angka partisipasi kasar APK SMA/SMK/SMLB/Paket C Provinsi Riau dan nasional enam tahun terakhir terlihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Perkembangan APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014– 2019

Indikator	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
APK SM Sederajat (Provinsi)	71.69	74.92	77.97	81.39	82.54	86.65
APK SM Sederajat (Nasional)	75.53	76.45	81.95	86.94	88.55	92.92

Sumber : Data Referensi Kemendikbud (updating bulan Maret 2020)

Grafik 3.1
Perbandingan Perkembangan APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau dan NasionalTahun 2014– 2019



Sumber : Data Referensi Kemendikbud (updating bulan Maret 2020)

Dari tabel dan grafik tersebut diatas terlihat bahwa baik APK provinsi maupun APK nasional mengalami kenaikan tiap tahunnya tetapi APK SM Sederajat Provinsi masih dibawah rata-rata Nasional. Di tahun 2014 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 3,84% dari rata-rata APK Sekolah Menengah Sederajat Nasional. Tahun 2015 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 1,53% dari rata-rata APK Sekolah Menengah Sederajat Nasional. Tahun 2016 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 3,96% dari rata-rata APK Sekolah Menengah Sederajat Nasional. Tahun 2017 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 5,55% dari rata-rata APK Sekolah Menengah Sederajat Nasional. Tahun 2018 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 6,01% dari rata-rata APK

Sekolah Menengah Sederajat Nasional. Tahun 2019 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 6,27% dari rata-rata APK Sekolah Menengah Sederajat Nasional.

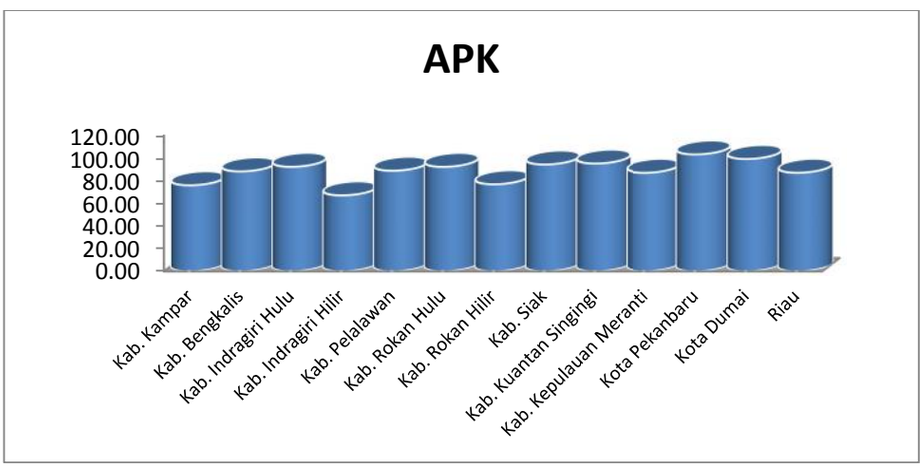
Tabel dan grafik berikut menggambarkan kondisi capaian APK Sekolah Menegah Sederajat di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2019.

Tabel 3.4
APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2019

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk 16-18	Jumlah siswa keseluruhan	APK %
1	Kab. Kampar	46.416	33.255	75.53
2	Kab. Bengkalis	36.754	30.62	87.73
3	Kab. Indragiri Hulu	22.613	18.688	91.74
4	Kab. Indragiri Hilir	40.599	25.921	66.68
5	Kab. Pelalawan	19.273	15.466	88.32
6	Kab. Rokan Hulu	27.906	22.933	91.70
7	Kab. Rokan Hilir	44.451	30.964	76.43
8	Kab. Siak	25.348	22.307	93.81
9	Kab. Kuantan Singingi	16.315	14.697	94.62
10	Kab. Kepulauan Meranti	10.66	8.996	86.59
11	Kota Pekanbaru	59.242	57.614	102.78
12	Kota Dumai	15.423	13.967	98.78
	Provinsi Riau	**365.000**	**295.428**	**86.65**

Sumber : Data Referensi Kemdikbud

Grafik 3.2
APK Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kotase Provinsi Riau Tahun 2019



Sumber : Data Referensi Kemdikbud

Tabel dan grafik 3.2 tersebut menunjukkan ada 4 (empat) Kabupaten/Kota yang capaian APK berada dibawah rata-rata APK Provinsi, yaitu Kabupaten Kabupaten Rokan Hilir (76,43%), Kabupaten Kampar (75,53%), Kabupaten Kepulauan Meranti (86,59%) dan Kabupaten Indragiri Hilir (66,68%), dengan capaian terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian intervensi pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai sasaran strategis pemerataan dan akses layanan pendidikan menengah yang seharusnya mendapat prioritas utama terhadap program dan kegiatan adalah Kabupaten Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Kampar, dan Kepulauan Meranti tetapi untuk daerah yang tinggi APK nya pun dapat diprioritaskan mengingat PPDB secara zonasi.

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Sederajat.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

APM digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. APM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa SMA/MA/SMK/Paket C Usia 16 – 18 Th}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 Tahun}} \text{ X } 100\%$$

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Sederajat digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran pemerataan dan akses pendidikan menengah, dicapai melalui program pendidikan menengah dan program pembangunan sekolah terpadu, dengan kegiatan antara lain pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan unit sekolah baru.

Untuk mengukur ketercapaian indikator ini diperlukan data Jumlah siswa Sekolah Menengah Sederajat Usia 16-18 Tahun dan jumlah penduduk usia 16–18 Tahun. Indikator APK SM Sederajat diperoleh dengan cara

membagi Jumlah siswa SM Sederajat Usia 16-18 Tahun dengan jumlah penduduk usia 16 – 18 Tahun dikalikan 100%.

Berdasarkan data dari Data Referensi Pendidikan Kemendikbud RI, Tahun 2019 siswa SM Sederajat Usia 16-18 Tahun di Provinsi Riau berjumlah 244.024 dan jumlah penduduk berusia 16–18 Tahun berjumlah 365.000 jiwa, dengan demikian APM SM sederajat Provinsi Riau adalah 66,86%. Dan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
APM Sekolah Menengah Sederajat
se Provinsi Riau Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018 (%)	Tahun 2019			Target Akhir Renstra Tahun 2019	Capaian terhadap Akhir renstra Tahun 2019
			Target (%)	Realisasi (%)	% capaian		
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	APM SMA / SMK/MA/ Paket C	63.81	61.59	66.86	108.56	61.59	108.56

Data Capaian kinerja tersebut diatas menggambarkan bahwa realisasi indikator APM SM Sederajat mengalami kenaikan sebesar 3,05%, dari 63,81% di Tahun 2018 menjadi 66,86% di Tahun 2019. Target APM SM Sederajat yang ditetapkan sebesar 61,59% sudah tercapai pada masa akhir Renstra tahun 2019.

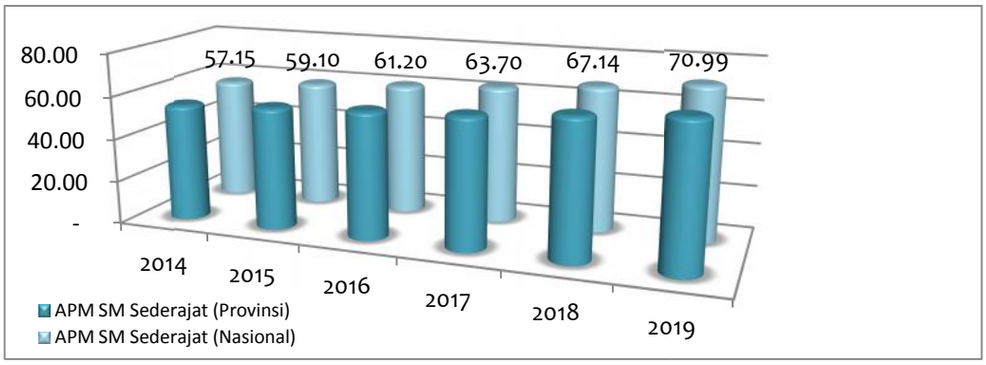
Tabel dan grafik dibawah ini menggambarkan tren pencapaian angka partisipasi Murni SM Sederajat Provinsi Riau dan nasional 6 (enam) Tahun terakhir:

Tabel 3.6
Perbandingan Perkembangan APM Sekolah Menegah Sederajat
Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2014 – 2019

Indikator	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
APM SM Sederajat (Provinsi)	54.59	56.71	58.63	60.22	63.81	66.86
APM SM Sederajat (Nasional)	57.15	59.10	61.20	63.70	67.14	70.99

Sumber : Data Referensi Kemendikbud (updating data bulan Maret 2020)

Grafik 3.3
Perbandingan Perkembangan APM SM Sederajat Provinsi Riau dan Nasional
Tahun 2014 – 2019



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Tabel dan grafik tersebut diatas menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

a) APM provinsi maupun APM nasional mengalami kenaikan tiap tahunnya tetapi APM SM Sederajat Provinsi masih dibawah rata-rata Nasional.
b) Tahun 2014 APM Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 2,56% dari rata-rata APM Sekolah Menengah Sederajat Nasional. Tahun 2015 APK Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 2,39% dari rata-rata APM Sekolah Menengah Sederajat Nasional.
c) Tahun 2016 APM Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 2,39% dari rata-rata APM Sekolah Menengah Sederajat Nasional.
d) Tahun 2017 APM Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 3,48% dari rata-rata APM Sekolah Menengah Sederajat Nasional.
e) Tahun 2018 APM Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 3,33% dari rata-rata APM Sekolah Menengah Sederajat Nasional.
f) Tahun 2019 APM Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau lebih rendah 4,13% dari rata-rata APM Sekolah Menengah Sederajat Nasional.

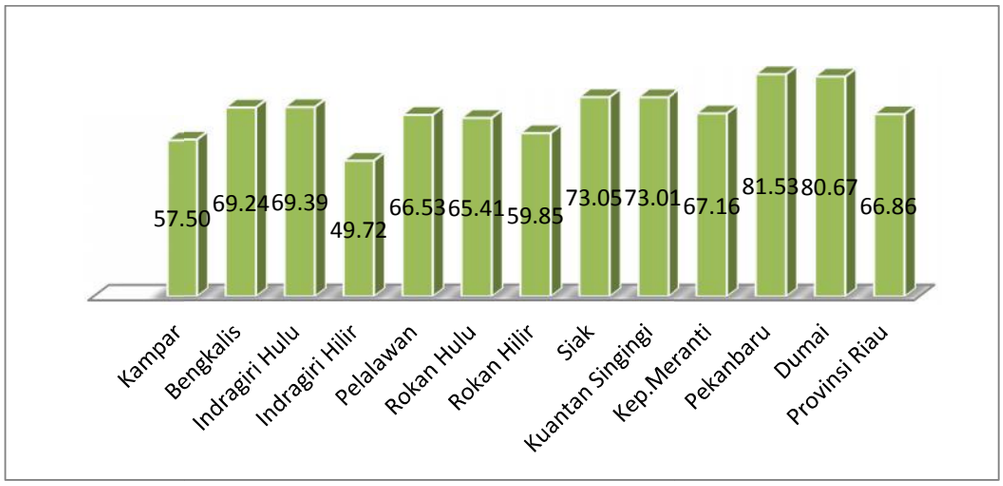
Untuk mengetahui realisasi atau capaian APM SM Sederajat di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.7
APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk 16-18	Jumlah Siswa Usia 16-18	APM %
1	Kampar	46.416	26.689	57.50
2	Bengkalis	36.754	25.45	69.24
3	Indragiri Hulu	22.613	15.692	69.39
4	Indragiri Hilir	40.599	20.185	49.72
5	Pelalawan	19.273	12.822	66.53
6	Rokan Hulu	27.906	18.252	65.41
7	Rokan Hilir	44.451	26.605	59.85
8	Siak	25.348	18.517	73.05
9	Kuantan Singingi	16.315	11.911	73.01
10	Kep.Meranti	10.66	7.159	67.16
11	Pekanbaru	59.242	48.301	81.53
12	Dumai	15.423	12.441	80.67
Provinsi Riau		**365.000**	**244.024**	**66.86**

Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Grafik 3.4
APM Sekolah Menengah Sederajat Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tahun 2019



Sumber : Data Referensi Kemendikbud

Dari tabel dan grafik tersebut diatas terdapat 4 (empat) kabupaten/kota yang realisasi/capaian APM SM Sederajat berada jauh di bawah rata-rata APM Provinsi yaitu Kabupaten Indragiri Hilir 49,72%(paling terendah), Kabupaten Rokan Hilir dengan capaian APM sebesar 59.85%, Kabupaten Kampar dengan capaian APM sebesar 57,50% dan Kabupaten Pelalawan dengan capaian APM sebesar 66,53%. Realisasi capaian APM SM Sederajat tertinggi adalah Kota Pekanbaru sebesar 81,53%.

Untuk mengetahui realisasi atau capaian APM SM Sederajat di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Rekapitulasi Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Aksesibiltas dan Mutu Pendidikan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	APK SMA/SMK/SMPLB/MA/ Paket C	84.96%	86.65%	101.99%
	APM SMA/SMK/SMPLB/MA/ Paket C	61.59%	66.86%	108.56%
Persentase Capaian Kinerja Dinas Pendidikan			**210.55%**	
Rata-Rata Persentase Capaian			**105.27%**	
Penyimpulan Sasaran			**SANGAT BERHASIL**	

Dari data tersebut terlihat bahwa capaian APK dan APM tahun 2019 untuk jenjang SMA Sederajat dibandingkan realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan dan sangat berhasil. Capaian kinerja untuk APK SMA/SMK/SMPLB/MA/Paket C adalah 101,19%, sedangkan APM SMA/SMK/SMPLB/MA/Paket C 108,56%. Secara umum target rencana strategis 2019 atau target akhir masa Renstra telah tercapai pada APK dan APM di jenjang SMA Sederajat.

b) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan /Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilaksanakan

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target indikator Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan adalah :

1) Adanya alokasi anggaran dari APBD
2) Adanya dukungan dana dari pemerintah pusat berupa DAK
3) Adanya komitmen yang tinggi dari Dinas Pendidikan untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimal

Meskipun telah mencapai target Renstra tetapi APK Provinsi Riau masih dibawah rata-rata nasional yaitu dari 100 persen jumlah penduduk usia 16-18 tahun, jumlah keseluruhan siswa yang bersekolah (termasuk usia yang dibawah 16 tahun atau diatas 18 tahun) sebesar 86.65% berarti masih ada 13,35% siswa lagi yang belum bersekolah. Begitu juga APM Provinsi Riau dari 100 persen jumlah penduduk usia 16-18 tahun, jumlah siswa yang bersekolah diusia 16-18 tahun sebesar 66,86% berarti masih ada 19,79% siswa yang tidak sesuai kelompok umur (usia yang dibawah 16 tahun atau diatas 18 tahun) dan 13,35% siswa lagi yang belum bersekolah. Oleh karena itu perlu upaya-upaya yang serius dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan menengah Wajar 12 tahun di Provinsi Riau. Upaya-upaya untuk mencapainya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pemenuhan akses pendidikan melalui Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Revitalisasi Sekolah Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Rehabilitasi Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Meubiler dan Media Pembelajaran, Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pendukung dan peningkatan pusat layanan autis. Peningkatan sarana dan prasarana dapat diprioritaskan kepada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau yang pencapaian Indikator APK dan APM nya rendah serta memperhatikan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sesuai zonasi.
2. Peningkatan partisipasi sekolah melalui Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional dan Pemberian beasiswa.

3. Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk peningkatan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan dan peningkatan mutu siswa melalui Pembangunan Laboratorium kimia,fisika, biologi, Ruang komputer, Ruang Praktek dan Ruang Multimedia, penyediaan media pembelajaran berbaris teknologi informasi, penyediaan alat praktek bagi siswa SMK serta Kegiatan siswa dalam beragam jenis serta mengembangkan kegiatan olimpiade dan festival berjenjang hingga ke tingkat nasional bahkan Internasional.

Adapun Hambatan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian Indikator APK dan APM Sekolah Menengah sederajat, antara lain :

a. Tingkat ekonomi masyarakat yang belum merata menyebabkan belum semua keluarga mampu mendukung peningkatan APK pendidikan menengah. Hal ini khususnya sangat berkaitan dengan biaya personal yang harus disediakan oleh orang tua terhadap pendidikan anaknya, dan pada sisi lain pemerintah belum mampu mencover keseluruhan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan menengah.
b. Masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh nilai ke-ekonomian anak yang diharapkan telah mampu mendukung ekonomi keluarga.
c. Masih terbatasnya satuan pendidikan menengah (SMA/SMK) pada daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau, sehingga lulusan SMP sederajat harus mengalokasikan biaya khusus untuk biaya personal guna memperoleh layanan pendidikan menengah di luar daerah.

Adapun solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut adalah :

a. Meningkatkan Pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan optimalisasi sekolah ramah social (sekolah gratis dan diasramakan bagi lulusan SMP sederajat kurang mampu dan berprestasi).
b. Mendekatkan layanan pendidikan (pendirian unit sekolah baru) kepada masyarakat pada wilayah geografis yang sulit dijangkau untuk menekan

pembiayaan personal yang harus dikeluarkan oleh peserta didik, termasuk kebijakan satu kecamatan satu SMA/SMK.

c. Peningkatan pemahaman bagi orang tua mengenai pentingnya pendidikan masa depan anak dengan tidak mengesampingkan faktor ke ekonomian dalam membantu ekonomi keluarga melalui pendekatan yang terintegrasi dengan pola kegiatan yang bernilai ekonomi.
d. Melalui pelaksanaan sekolah marginal dan sekolah jarak jauh.

c) Analisis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pada tahun 2019 dalam Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan dapat dicapai melalui Program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kegiatan Penunjang sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi SMA/SMK 4 sekolah
2. Pengadaan Meubiler Sekolah SMA 14 Sekolah
3. Peningkatan Infrastruktur SMA 12 Sekolah
4. Pengadaan Media Pembelajaran SMA 4 Sekolah
5. Pembangunan Pagar SMA
6. Pengadaan Media Pembelajaran SMK 9 sekolah
7. Peningkatan Infrastruktur SMK 11 Sekolah
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK 6 sekolah
9. Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK 58 sekolah (DAK)
10. Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK 59 sekolah (DAK)
11. Rehab Ruang Kelas SLB 4 ruang (DAK)
12. Ruang KelasBaru SLB 6 ruang (DAK)
13. Pengadaan Peralatan Pendidikan SLB 5 sekolah (DAK)
14. Pengadaan Media Pendidikan SLB 1 sekolah (DAK)
15. Rehabiltasi sarana dan prasarana PKLK 4 sekolah
16. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan kependidikan Guru marginal dan guru pembimbing khusus dilokasi 3 T di 10 kab/kota sebanyak 197 orang

17. Penyelenggaraan Penunjang Layanan Mutu Pendidikan PKLK di 8 asrama
18. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan perabotnya SMA 6 sekolah (DAK)
19. Pembangunan Ruang Labor IPA SMA beserta perabot 13 sekolah (DAK)
20. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA 16 sekolah (DAK)
21. Rehab Ruang Labor IPA beserta perabot 2 sekolah (DAK)
22. Rehabilitasi Ruang Guru danPerabot 2 sekolah (DAK)
23. Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dan Perabot 1 sekolah (DAK)
24. Rehabilitasi Labor Komputer 1 sekolah (DAK)
25. Rehabilitasi Toilet siswa /guru 5 sekolah (DAK)
26. Pembangunan Toilet/Jamban 19 sekolah (DAK)
27. Pengadaan Media Pendidikan 13 sekolah (DAK)
28. Pengadaan Peralatan Pendidikan 30 sekolah (DAK)
29. Pembangunan Rumah Guru 3 sekolah (DAK)
30. Pembangunan Asrama Siswa 2 sekolah (DAK)

d) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019.

Tabel 3.9
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	APK Paket C	SMA/SMK/SMPLB/MA/	105.27	86.50	18.77
		APM Paket C	SMA/SMK/SMPLB/MA/			

Dari penyajian tabel diatas dapat dianalisa sebagai berikut Meskipun anggaran tidak terealisir 100% namun capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan adalah 105,27%. Sehingga bisa diperoleh kesimpulan bahwa ada efisiensi sumber daya sebesar 18,77%.

e) Capaian Kinerja Sasaran Peningkatan Akses Dan Mutu Pendidikan Yang Mendukung Sasaran RPJMD Yang Terdapat Di Perubahan Renstra Tahun 2014-2019 .

Sasaran Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan yang mendukung sasaran RPJMD yang terdapat di Perubahan Renstra Tahun 2014-2019

diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Untuk mengukur capaiankinerja pada Sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Aksesibiltas dan Mutu Pendidikan
yang mendukung Sasaran RPJMD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja sasaran pada Tahun ke			Realisasi setiap tahun ke			Capaian setiap tahun ke		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8.69	8.79	8.89	8.76	8.92	9.03	100.81	101.48	101.57
		Angka Harapan Lama Sekolah	12.98	13.10	13.22	13.03	13.11	13.14	100.39	100.08	99.39

Sumber Data : BPS Provinsi Riau

Dari data diatas jelas terlihat bahwa pencapaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah telah mencapai target Perubahan Renstra tahun 2014-2019. Namun demikian berbagai upaya akan untuk terus dilakukan guna meningkatkan dan mempertahankan kondisi tersebut.

1. **IndikatorAngka rata-rata lama sekolah**

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. RLS diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun keatas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun keatas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Bersumber dari Badan Pusat Statistik Riau, rata-rata lama sekolah Provinsi Riau Tahun 2019 baru mencapai 9,03 tahun, naik 0,11 dari tahun sebelumnya (8,92 tahun).

Tabel 3.11
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kuantan Singingi	8.17	8.18	8.19	8.2	8.31	8.58
Indragiri Hulu	7.55	7.82	7.83	7.89	8.16	8.17
Indragiri Hilir	6.81	6.82	6.94	7.18	7.19	7.22
Pelalawan	7.82	8.17	8.18	8.19	8.44	8.49
Siak	9.05	9.2	9.21	9.4	9.64	9.65
Kampar	8.62	8.84	8.85	9.09	9.1	9.25
Rokan Hulu	7.83	7.84	7.97	8.18	8.37	8.38
Bengkalis	8.8	8.82	8.83	8.89	9.21	9.41
Rokan Hilir	7.62	7.62	7.88	7.89	8.15	8.24
Kepulauan Meranti	7.44	7.45	7.46	7.47	7.48	7.51
Pekanbaru	10.95	10.97	11.20	11.21	11.22	11.43
Dumai	9.56	9.57	9.58	9.67	9.84	9.85
RIAU	**8.47**	**8.49**	**8.59**	**8.76**	**8.92**	**9.03**

Sumber Data : BPS Provinsi Riau

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan peningkatan rata-rata lama sekolah Provinsi Riau dari tahun 2014-2019 sebesar 0,56 persen. Angka rata-rata lama sekolah tertinggi tahun 2019 terdapat pada Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Siak.

2. Indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka harapan lama sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 Tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Jika dilihat dari indikator angka HLS Provinsi Riau sebesar 13,14 Tahun 2019. Bersumber dari Badan Pusat Statistik Riau, Harapn Lama Sekolaj Provinsi Riau Tahun 2019 baru mencapai 13,14 tahun, naik 0,03 dari tahun sebelumnya (13,11 tahun).

Tabel 3.12
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (HLS)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kuantan Singingi	11.96	12.64	12.81	13.26	13.27	13.32
Indragiri Hulu	11.51	11.92	12.24	12.29	12.32	12.35
Indragiri Hilir	10.67	11.38	11.58	11.88	11.89	11.90
Pelalawan	11.02	11.56	11.68	11.89	12.16	12.17
Siak	11.81	12.26	12.56	12.72	12.73	12.75
Kampar	12.72	12.86	12.87	13.2	13.21	13.45
Rokan Hulu	12.36	12.39	12.59	12.81	12.82	12.83
Bengkalis	12.35	12.39	12.72	12.73	12.83	12.86
Rokan Hilir	11.42	11.75	12.06	12.25	12.63	12.67
Kepulauan Meranti	12.34	12.41	12.74	12.77	12.78	12.81
Pekanbaru	14.07	14.86	14.87	14.93	15.34	15.37
Dumai	12.40	12.46	12.75	12.97	12.98	13.10
RIAU	12.45	12.74	12.86	13.03	13.11	13.14

Sumber Data : BPS Provinsi Riau

Berdasarkan tabel diatas, menunjukan peningkatan Harapan Lama sekolah Provinsi Riau dari tahun 2014-2019 sebesar 0,69 persen. Harapan lama sekolah tertinggi tahun 2019 terdapat pada Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Kampar.

f) Capaian Kinerja Eselon III Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun pengukuran Capaian kinerja eselon III Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai berikut :

1) Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Pengukuran kinerjanya dapat dilihat pada tabel 3.13 yaitu :

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Eselon III Tahun 2019
Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
SEKRETARIAT								
1	Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS), Jumlah penghasilan yang diterima oleh tenaga pendidik dan kependidikan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	66.67	473,678,400	242,720,800	51.24
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	9,372,895,000	7,936,448,164	84.67
3	Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Sarana Pendidikan	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Jumlah Sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	964,000,000.00	804,731,948	83.48
4	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan,	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100	3,893,272,550	3,576,470,199	91.86
5	Meningkatnya Pengembangan Data/Informasi, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan	Terlaksananya Pengembangan Data/Informasi, Persentase Jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	735,925,200.00	692,897,900	94.15
Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Pendidikan			**27 Kegiatan**	**26 Kegiatan**	**93.33**	**15,439,771,150**	**13,253,269,011**	**85.84**

Tabel 3.13 diatas menggambarkan bahwa Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Pendidikan Tahun 2019 sesuai Perjanjian Kinerja dari 5 sasaran capaian target realisasinya tercapai 93,33% dan keuangannya Rp.

13.253.269.011,- dari target Rp. 15.439.711.150,- capaian anggarannya 84,27%. Dari target kinerja 27 kegiatan hanya 1 kegiatan yang tidak terlaksana yaitu kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Kerja Pengawas Sekolah. Tidak tercapainya target realisasi kinerja dan keuangan disebabkan oleh faktor :

a) Efisiensi terhadap anggaran
b) sisa kontrak dari pekerjaan penunjukan langsung maupun pekerjaan lelang barang dan jasa
c) Jadwal Kegiatan yang bentrok dengan jadwal kegiatan lain di bidang yang sasaran target outputnya adalah pengawas pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Solusi atas kendala tidak tercapainya realisasi kinerja dan keuangan di Sekretariat adalah Menyusun anggaran pada masa yang akan datang secara efektif dan efisien dan menyusun jadwal kegiatan secara maksimal.

2) Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Pengukuran kinerjanya dapat dilihat pada tabel 3.14 yaitu :

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Eselon III Tahun 2019
Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
BIDANG SMA								
1	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS)	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	8,209,737,000	7,228,097,500	88.04

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
2	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi	25 Kegiatan	20 Kegiatan	80	731,271,586,735	572,150,782,373	78.24
Capaian Kinerja Kabid. SMA Dinas Pendidikan			**31 Kegiatan**	**26 Kegiatan**	**83.87**	**739,481,323,735**	**579,378,879,873**	**78.35**

Tabel 3.14 diatas menggambarkan bahwa Capaian Kinerja Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Tahun 2019 sesuai Perjanjian Kinerja dari 2 sasaran capaian target realisasinya tercapai 83,87% dan keuangannya Rp.579.378.879.873,- dari target Rp. 739.481.323.735,- capaian anggarannya 78,35%. Dari target kinerja ada 7 kegiatan yg tidak terlaksana di sasaran Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi, salah satunya Kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru tidak terlaksana 100 persen hanya pencairan perencanaannya saja. Tidak tercapainya target realisasi kinerja dan keuangan disebabkan oleh faktor :

a) Efisiensi terhadap anggaran dan sisa kontrak dari pekerjaan penunjukan langsung maupun pekerjaan lelang barang dan jasa
b) Proses penyelesaian penghapusan aset sekolah yang memerlukan waktu yang lama pada Kegiatan Revitalisasi sekolah

c) Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) pada sumber dana berasal dari DID (Dana Intensif Daerah) yang syarat pencairan DID di bulan Agustus sudah mencapai realisasi minimal 70 persen sementara kegiatan pembangunan ini membutuhkan waktu untuk pekerjaan konsultansi perencanaan, fisik dan proses pengawasan sampai 10 bulan atau 11 bulan.
d) Proses lelang umum tidak berjalan dan keterlambatan proses tender ULP sehingga waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan lagi pada Peningkatan Infrastruktur SMA
e) Pekerjaan Perencanaan dilakukan pada Tahun Anggaran 2017 sehingga tidak sesuai lagi dengan indeks harga pada Tahun 2019 pada kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Labor IPA SMA
f) Lambatnya Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan BOS Affirmasi, terlambatnya Alokasi Keputusan Menteri Kemendikbud RI tentang penunjukan sekolah penerima BOS Afiirmasi, Perlu dilakukan perubahan penjabaran APBD untuk Alokasi penerima BOS Kinerja, sekolah tidak memungkinkan melakukan pelelangan karena waktunya tidak memungkinkan.

Solusi atas kendala tidak tercapainya realisasi kinerja dan keuangan di Bidang SMA adalah :

a. Dalam perencanaan penganggaran untuk pengusulan sekolah yang direvitalisasi dipastikan telah selesai proses penghapusan asetnya dan usulan kegiatan Unit SekolahBaru dapat dipastikan status lahan yang akan dibangun.
b. Untuk kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dapat dianggarkan dengan sumber dana berasal dari PAD APBD sehingga pekerjaan yang memerlukan waktu 10 s.d 11 bulan dapat diselesaikan.
c. Disusun penjadwalan pekerjaan fisik lebih awal dan berkoordinasi dengan pihak pokja dalam hal penetapan waktu lelang sehingga kegiatan fisik terlaksana hingga selesai dan anggaran terserap 90 persen.
d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat mengenai percepatan Petunjuk Teknis BOS Affirmasi dan BOS Kinerja dan melakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa lebih awal melalui UKPBJ

3) Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Pengukuran kinerjanya dapat dilihat pada tabel 3.15 yaitu :

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Eselon III Tahun 2019
Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
BIDANG SMK								
1	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00	6,052,334,100	4,412,201,682	72.90
2	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12 tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi	22 Kegiatan	15 Kegiatan	68.18	160,233,024,110	120,791,281,252	75.38
Capaian Kinerja Kabid. SMK Dinas Pendidikan			**26 Kegiatan**	**19 Kegiatan**	**73.08**	**166,285,358,210**	**125,203,482,934**	**75.29**

Tabel 3.15 diatas menggambarkan bahwa Capaian Kinerja Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Tahun 2019 sesuai Perjanjian Kinerja dari 2

sasaran capaian target realisasinya tercapai 73,08% dan keuangannya Rp.125.203.482.934,- dari target Rp. 166.285.358.210,- capaian anggarannya 75,29%. Dari target kinerja ada 7 kegiatan yg tidak terlaksana di sasaran Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi. Tidak tercapainya target realisasi kinerja dan keuangan disebabkan oleh faktor :

a) Efisiensi terhadap anggaran dan sisa kontrak dari pekerjaan penunjukan langsung maupun pekerjaan lelang barang dan jasa
b) Proses penyelesaian penghapusan aset sekolah yang memerlukan waktu yang lama pada Kegiatan Revitalisasi sekolah
c) Proses lelang umum tidak berjalan dan keterlambatan proses tender ULP sehingga waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan lagi pada kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah SMK, Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Perlengkapannya
d) Dokumen status kepemilikan lahan yang tidak jelas pada Kegiatan pembangunan Unit Sekolah Baru SMK
e) Keterlambatan proses tender ULP sehingga waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan lagi pada Kegiatan Pembangunan Perpustakaan SMK, Kegiatan Peningkatan Sarana dan prasarana pembelajaran praktek produktif SMK, auditorium SMK/Gedung serbaguna SMK
f) Program SMK 4 TAHUN yang diimulai dari tahun 2017, pada tahun 2019 siswa SMK baru berada pada tahun ke-3, sehingga program penanganan SMK 4 Tahun baru dilaksanakan tahun ajaran 2020/ tahun ke- 4.
g) Terdapat kode rekening belanja hibah yang beresiko tinggi. Di Kementrian Pendidikan kegiatan alih profesi (keahlian ganda) tidak dilaksanakan lagi pada tahun 2019 untuk sertifikatnya, Kementrian tidak lagi mau menerbitkan.

Solusi atas kendala tidak tercapainya realisasi kinerja dan keuangan di Bidang SMK adalah :

a. Dalam perencanaan penganggaran untuk pengusulan sekolah yang direvitalisasi dipastikan telah selesai proses penghapusan asetnya dan usulan kegiatan Unit SekolahBaru dapat dipastikan status lahan yang akan dibangun.
b. Disusun penjadwalan pekerjaan fisik lebih awal dan berkoordinasi dengan pihak pokja dalam hal penetapan waktu lelang sehingga kegiatan fisik terlaksana hingga selesai dan anggaran terserap 90 %.
c. Menyusun anggaran pada masa yang akan datang secara efektif dan efisien

4) Kepala Bidang PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Pengukuran kinerjanya dapat dilihat pada tabel 3.16 yaitu :

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Eselon III Tahun 2019
Kepala Bidang PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
BIDANG PKPLK								
1	Meningkatnya Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Terlaksananya Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	18 Kegiatan	17 Kegiatan	94.44	44,392,524,000	39,064,127,999	88.00
Capaian Kinerja Kabid. PKLK Dinas Pendidikan			**18 Kegiatan**	**17 Kegiatan**	**94.44**	**44,392,524,000**	**39,064,127,999**	**88.00**

Tabel 3.16 diatas menggambarkan bahwa Capaian Kinerja Kepala Bidang PKLK Dinas Pendidikan Tahun 2019 sesuai Perjanjian Kinerja dari sasaran capaian target realisasinya tercapai 94,44% dan keuangannya Rp.39.064.127.999,- dari target Rp. 44.392.524.000,- capaian anggarannya 88,00 %. Dari target kinerja ada 1 kegiatan yg tidak terlaksana di sasaran Meningkatnya program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Tidak tercapainya target realisasi kinerja dan keuangan disebabkan oleh faktor :

a) Efisiensi terhadap anggaran dan sisa kontrak dari pekerjaan penunjukan langsung maupun pekerjaan lelang barang dan jasa

b) Spesifikasi barang tidak ada yang sama dengan spesifikasi yang ada di e-*catalog* dan berdasarkan survei barang dilapangan memakan waktu kurang 2 bulan ditambah 1 bulan proses lelang dan untuk pembuatan barang menghabiskan waktu 3 sampai 4 bulan dikarenakan meubiler untuk siswa SLB Custom pada kegiatan Pengadaan Meubiler PKLK.

Solusi atas kendala tidak tercapainya realisasi kinerja dan keuangan di Bidang PKLK adalah :

a. Disusun penjadwalan pekerjaan fisik lebih awal dan berkoordinasi dengan pihak pokja dalam hal penetapan waktu lelang sehingga kegiatan fisik terlaksana hingga selesai dan anggaran terserap 90 persen.
b. Menyusun anggaran pada masa yang akan datang secara efektif dan efisien

5) Kepala Bidang Pendataan Dan Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Pengukuran kinerjanya dapat dilihat pada tabel 3.17 yaitu :

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Eselon III Tahun 2019
Kepala Bidang Pendataan Dan Pengembangan Pendidikan
Dinas Pendidikan Provinsi Riau

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
BIDANG PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN								
1	Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM,	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah, Persentase jumlah sekolah yang mengelola TIK dengan baik, Jumlah sarana pendidikan yang memenuhi syarat minimal, Persentase jumlah penduduk usia sekolah yang menamatkan pendidikan 12	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0	500,000,000	0.00	0.00

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi Target	Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
	Sertifikasi Kompetensi	tahun, Jumlah SDM yang memenuhi kompetensi, Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi						
2	Meningkatnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Peningkatan Implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS)	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, persentase jumlah sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS)	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	54,791,782,700	37,992,105,056	69.34
Capaian Kinerja Kabid. PKLK Dinas Pendidikan			**13 Kegiatan**	**12 Kegiatan**	**92.31**	**55,291,782,700**	**37,992,105,056**	**68.71**

Tabel 3.17 diatas menggambarkan bahwa Capaian Kinerja Kepala Bidang Pendataan Dan Pengembangan Pendidikan Dinas Pendidikan Tahun 2019 sesuai Perjanjian Kinerja dari sasaran capaian target realisasinya tercapai 94,44% dan keuangannya Rp.39.064.127.999,- dari target Rp. 44.392.524.000,- capaian anggarannya 88,00%. Dari target kinerja ada 1 kegiatan yg tidak terlaksana di sasaran Meningkatnya Program Pendidikan Menengah, Peningkatan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan, Peningkatan Sarana Pendidikan, Peningkatan Program wajib belajar 12 tahun, Kompetensi SDM, Sertifikasi Kompetensi.

Tidak tercapainya target realisasi kinerja dan keuangan disebabkan oleh faktor :

a) Efisiensi terhadap anggaran dan sisa kontrak dari pekerjaan penunjukan langsung maupun pekerjaan lelang barang dan jasa

b) Tidak terpenuhinya kuota pemberian beasiswa dikarenakan banyak yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada kegiatan beasiswa bidik misi untuk ekonomi kurang mampu.
c) Jumlah mahasiswa yang mengajukan beasiswa tidak mencapai kuota yang tersedia pada kegiatan Beasiswa Tamatan SLTA pada Perguruan tinggi Nasional.

Solusi atas kendala tidak tercapainya realisasi kinerja dan keuangan di Bidang Pendataan Dan Pengembangan Pendidikan adalah :

a. Disusun penjadwalan pekerjaan fisik lebih awal dan berkoordinasi dengan pihak pokja dalam hal penetapan waktu lelang sehingga kegiatan fisik terlaksana hingga selesai dan anggaran terserap 90 persen.
b. Agar kuota beasiswa dapat di penuhi dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi tingkat nasional dan melakukan publikasi yang lebih luas.
c. Menyusun anggaran pada masa yang akan datang secara efektif dan efisien.

C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Derah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Berikut Realisasi Anggaran dan penjalasannya :

1. REALISASI ANGGARAN APBD

Anggaran belanja Dinas Pendidikan Provinsi Riau terbagi 2 (dua) bagian terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan mengedepankan prinsip efekrifitas dan efisiensi, sehingga sampai dengan bulan Desember 2019 diperoleh capaian realisasi fisik dan daya serap keuangan. Analisis efisiensi dan efektifitas merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2019 yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Riau. Sedangkan untuk rincian realisasi masing-masing pelaksanaan program Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019 dengan total realisasi jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp. **1,040,344,377,326**,- dan realisasi

jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp. **795,396,461,333**,- dapat dilihat pada tabel 3.18 sebagai berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Keuangan dan Fisik
Dinas Pendidikan Provinsi Riau

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
1	Belanja Tidak Langsung	**1,040,344,377,326.00**	**1,040,344,377,326.00**	**100.89**	**100**
2	Belanja Langsung	**919,535,818,171.00**	**795,396,461,333**	**86.50**	**93.36**
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,110,895,000.00	7,936,448,164.00	87.11	100.00
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1,012,000,000.00	804,731,948.00	79.52	100.00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	463,678,400.00	242,720,800.00	52.35	79.00
	Program Pendidikan Menengah	456,361,160,545.00	400,381,745,668.00	87.73	88.00
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	80,253,025,300.00	58,984,453,845.00	73.50	100.00
	Program Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus	84,055,679,800.00	44,682,864,464.00	53.16	88.52
	Program Bantuan Operasional Sekolah	288,279,379,126.00	282,363,496,444.00	97.95	98
	TOTAL	**1,959,880,195,497.00**	**1,844,993,810,495.00**	**93.69**	**96.68**

Sumber data : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Berikut realisasi kinerja keuangan dan fisik pada 7 (tujuh) program pada Belanja Langsung yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini adalah sejumlah Rp. 9.110.895.000,- dalam pelaksanaanya, anggaran yang terealisasikan adalah sejumlah Rp. 7.936.448.164,- atau sejumah 87.11%. Dengan demikian, meski ada efisiensi anggaran, namun capaian kinerja bisa mencapai 100%.

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

  Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini adalah sejumlah Rp. 1.012.000.000,- dalam pelaksanaannya anggaran yang terealisasikan adalah sejumlah Rp. 804.731.948,- atau sejumlah 79.52%. Dengan demikian, meski ada efisiensi anggaran, namun capaian kinerja bisa mencapai 100%.

- Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

  Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini adalah sejumlah Rp. 463.678.400,- dalam pelaksanaanya, anggaran yang terealisasikan adalah sejumlah Rp. 242.720.800,- atau sejumlah 52.35%. Capaian dari kinerja secara fisik adalah 79.00% yang terdiri dari efisiensi anggaran namun terdapat kegiatan yang tidak terlaksana sehingga realisasi kinerja tidak mencapai 100%.

- Program Pendidikan Menengah

  Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini adalah sejumlah Rp. 456.361.160.545,- dalam pelaksanaanya, anggaran yang terealisasikan adalah sejumlah Rp. 400.381.745.668,- atau sejumah 87.73%. Capaian dari kinerja secara fisik adalah 88.00% yang terdiri dari efisiensi anggaran namun terdapat kegiatan yang tidak terlaksana sehingga realisasi kinerja tidak mencapai 100%.

- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

  Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini adalah sejumlah Rp. 80.253.025.300,- dalam pelaksanaannya anggaran yang terealisasikan adalah sejumlah Rp. 58.984.453.845,- atau sejumlah 73.50%. Dengan demikian, meski ada efisiensi anggaran, namun capaian kinerja bisa mencapai 100%.

- Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

  Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini adalah sejumlah Rp. 84.055.679.800,- dalam pelaksanaanya, anggaran yang

terealisasikan adalah sejumlah Rp. 44.682.864.464,- atau sejumlah 53.16%. Capaian dari kinerja secara fisik adalah 88.52% yang terdiri dari efisiensi anggaran namun terdapat kegiatan yang tidak terlaksana dan tidak mencapai target kinerja yang diharapkan sehingga realisasi kinerja tidak mencapai 100%.

- Program Bantuan Operasional Sekolah

  Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini adalah sejumlah Rp. 288.279.379.126,- dalam pelaksanaanya, anggaran yang terealisasikan adalah sejumlah Rp. 282.363.496.444,- atau sejumlah 97.95%. Capaian dari kinerja secara fisik adalah 98.00% yang terdiri dari efisiensi anggaran namun terdapat sisa dana bos tahun sebelumnya tidak terealisasi dan anggaran tahun 2019 sudah mencukupi untuk pelaksanaannya.

2. REALISASI ANGGARAN APBN (DANA DEKONSENTRASI)

Anggaran APBN (Dana Dekonsentrasi) Dinas Pendidikan Provinsi Riau terdiri dari 3 program yaitu Program Pendidikan Dasar Dan Menengah, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan dan Program Guru Dan Tenaga Kependidikan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan mengedepankan prinsip efekrifitas dan efisiensi, sehingga sampai dengan bulan Desember 2019 diperoleh capaian realisasi fisik dan daya serap keuangan.

Analisis efisiensi dan efektifitas merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2019 yang dibiayai dari dana APBN. Sedangkan untuk rincian realisasi masing-masing pelaksanaan program APBN Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019 dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. **6,218,424,000**,- dari total anggaran Rp. **5,957,031,200**,- dengan capaian kinerja anggaran **95,80** % dapat dilihat pada tabel 3.19 sebagai berikut :

Tabel 3.19
Rekapitulasi Capaian Kinerja Keuangan Dana Dekonsentrasi (APBN)
Dinas Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)
1	2	3	4	5	5
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH		4,852,584,000	4,601,934,800	94.83	100.00
1	Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	781,905,000	702,915,100	89.90	100.00
2	Pembinaan Sekolah Menengah Atas	2,394,835,000	2,365,273,800	98.77	100.00
3	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1,675,844,000	1,533,745,900	91.52	100.00
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		369,778,000	369,593,200	99.95	100.00
PROGRAM GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		996,062,000	985,503,200	98.94	100.00
JUMLAH ANGGARAN		6,218,424,000	5,957,031,200	95.80	100.00

Tabel 3.19 tersebut diatas menggambarkan realisasi kinerja keuangan dana dekonsentrasi untuk 3 program yaitu Program Pendidikan Dasar dan Menengah, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Program Guru dan Tenaga Kependidikan Tahun 2019 di lingkungan Dinas Pendidikan sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Dasar dan Menengah dari pagu anggaran sebesar Rp.4.852.584.000,-terealisasi sebesar Rp.4,601,934,800,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94,83%. Dengan demikian, meski ada efisiensi anggaran, namun capaian kinerja fisik bisa mencapai 100%. Efisiensi program tersebut dari sisa kontrak dan biaya perjalanan dinas.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dari pagu anggaran sebesar Rp.369,778,000,- terealisasi sebesar Rp. 369,593,200,- dengan capaian kinerja keungan sebesar 99,95%. Dengan demikian, meski ada efisiensi

anggaran, namun capaian kinerja fisik bisa mencapai 100%. Efisiensi program tersebut dari sisa kontrak dan biaya perjalanan dinas.

3. Program Guru dan Tenaga Kependidikan dari pagu anggaran sebesar Rp.996,062,000,- terealisasi sebesar Rp. 985,503,200,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95,21%. Dengan demikian, meski ada efisiensi anggaran, namun capaian kinerja fisik bisa mencapai 100%. Efisiensi program tersebut dari sisa kontrak dan biaya perjalanan dinas.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2019. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan *(stakeholders)* di dunia pendidikan. Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2019 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis dari tujuh program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2019. Ringkasan pengukuran kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau sesuai Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Aksesibiltas dan Mutu Pendidikan Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	APK SMA/SMK/SMPLB/MA/ Paket C	84.96%	86.65%	101.99%
	APM SMA/SMK/SMPLB/MA/ Paket C	61.59%	66.86%	108.56%
Persentase Capaian Kinerja Dinas Pendidikan			**210.55%**	
Rata-Rata Persentase Capaian			**105.27%**	
Penyimpulan Sasaran			**SANGAT BERHASIL**	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun 2019 yang diukur berdasarkan satu sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dapat tercapai sebesar 105,27%, sehingga capaian kinerja dikategorikan "sangat berhasil".

Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan tahun 2019 untuk belanja tidak langsung dan tidak langsung adalah sebesar 93,69%. Belanja tidak langsung terealisasi sebesar 100,89%, masuk dalam katagori sangat tinggi dan belanja langsung terealisasi

sebesar 86,50% dengan kategori tinggi. Keberhasilan atau kegagalan yang ada pada tahun 2019 atau tahun kelima dari pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2014-2019, merupakan dasar berpijak bagi Dinas Pendidikan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang pendidikan untuk tahun berikutnya sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan dan antara lain adalah pengimplementasian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP), peningkatan akses dari jenjang pendidikan menengah, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan ujian nasional yang lebih berkualitas, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan khususnya penyediaan sarana dan prasana di daerah tertinggal, terdepan dan terpencil, penyebaran guru yang belum merata.

Dinas Pendidikan pada masa mendatang akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan Misi terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan berdaya saing dapat terealisasi. sebagai bagian dari perbaikan kinerja SKPD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj-IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKj-IP benar-benar menjadi bagian dari system monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2019

PENGUKURAN KINERJA ESELON III DAN IV TAHUN 2019
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

No.	Sasaran	Target		Realisasi Target		Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
UMUM							**9,199,487,900**	**7,422,423,885**	**80.68**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							**7,472,895,000**	**6,112,141,110**	**81.79**
1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12	Bulan	12	Bulan	100.00	1,818,150,000.00	1,619,744,888	89.09
2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	100.00	880,920,000.00	569,022,500	64.59
3	Terlaksanaanya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	100.00	54,585,000.00	54,385,000	99.63
4	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	100.00	525,600,000.00	487,675,000	92.78
5	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	12	Bulan	12	Bulan	100.00	500,000,000.00	192,520,000	38.50
6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi	12	Bulan	12	Bulan	100.00	1,180,340,000.00	1,138,900,000	96.49
7	Terlaksananya Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi	12	Bulan	12	Bulan	100.00	113,300,000.00	113,300,000	100.00
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Riau di 11 Kab/Kota	12	Bulan	12	Bulan	100.00	2,400,000,000.00	1,936,593,722	80.69
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur							**614,000,000**	**456,374,475**	**74.33**
9	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12	Bulan	12	Bulan	100.00	374,000,000.00	165,500,000	44.25
10	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bulan	12	Bulan	100.00	200,000,000.00	251,044,475	125.52
11	Terlaksananya Penyediaan Sarana Kearsipan	12	Bulan	12	Bulan	100.00	40,000,000.00	39,830,000	99.58
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							**638,914,500**	**611,187,500**	**95.66**
13	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau	12	Bulan	12	Bulan	100.00	500,000,000.00	476,320,500	95.26
14	Terlaksananya Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	12	Kab/Kota	12	Kab/Kota	100.00	138,914,500.00	134,867,000	97.09
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							**473,678,400**	**242,720,800**	**51.24**
15	Terlaksananya Peningkatan Pelaksana Kerja Pengawas Sekolah	12	Bulan	12	Bulan	100.00	200,000,000.00	23,118,000	11.56

No.	Sasaran	Target		Realisasi Target		Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
16	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal	12	Bulan	12	Bulan	100.00	73,678,400.00	41,602,800	56.47
17	Terlaksananya Pembinaan Jasmani dan Rohani	12	Bulan	12	Bulan	100.00	200,000,000.00	178,000,000	89.00
PERENCANAAN							**4,090,283,250**	**3,755,596,999**	**91.82**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							100,000,000	97,416,400	
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00	100,000,000	97,416,400	97.42
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							**3,990,283,250**	**3,658,180,599**	**91.68**
19	Terlaksananya Diklat Kompetensi Pemamfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	17047	eks	17047	eks	100.00	735,925,200.00	692,897,900	94.15
20	TerlaksananayaPengadaan Kelender Pendidikan	11743	eks	11743	eks	100.00	273,920,000.00	254,354,749	92.86
21	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Jurnal Karya Tulis Ilmiah	270	Orang	270	Orang	100.00	755,000,050.00	709,728,650	94.00
22	Terlaksananya Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial	12	Kab/Kota	12	Kab/Kota	100.00	775,438,000.00	670,550,900	86.47
23	Terlaksananya Pencapaian SPM Pendidikan dan Pemantauan/Evaluasi SPM Pendidikan di Provinsi Riau dan Kab/Kota	1	Tahun	1	Tahun	100.00	750,000,000.00	732,398,400	97.65
24	Terlaksananya Diklat Muatan Lokal Bagi Guru SMA/SMK Se-Provinsi Riau	415	Orang	415	Orang	100.00	700,000,000.00	598,250,000	85.46
KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN							**2,150,000,000**	**2,075,248,127**	**96.52**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							**1,800,000,000**	**1,726,890,654**	**95.94**
25	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Bulan	12	Bulan	100.00	600,000,000.00	585,370,500	97.56
26	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	12	Bulan	12	Bulan	100.00	300,000,000.00	247,721,000	82.57
27	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12	Bulan	12	Bulan	100.00	900,000,000.00	893,799,154	99.31
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							**350,000,000**	**348,357,473**	**99.53**
28	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	Bulan	12	Bulan	100.00	350,000,000.00	348,357,473	99.53
BIDANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)							**739,481,323,735**	**579,378,879,873**	**78.35**
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							**8,209,737,000**	**7,228,097,500**	**88.04**

No.	Sasaran	Target		Realisasi Target		Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
29	Terlaksananya Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	40	Orang	40	Orang	100.00	915,058,100	703,416,800	76.87
30	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	7	Cabang Lomba	7	Cabang Lomba	100.00	1,880,524,000	1,762,686,000	93.73
31	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	5	Medali	5	Medali	100.00	2,650,357,200	2,340,622,900	88.31
32	Terlaksananya Debat bahasa Inggris SMA	48	Siswa	48	Siswa	100.00	451,293,900	408,335,000	90.48
33	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	444	Siswa	444	Siswa	100.00	1,868,425,800	1,621,900,400	86.81
34	Terlaksananya Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA	150	Orang	150	Orang	100.00	444,078,000	391,136,400	88.08
Program Pendidikan Menengah							**731,271,586,735**	**572,150,782,373**	**78.24**
35	Terlaksananya Pelatihan Kompetensi Tenaga Pedidik	420	Orang	420	Orang	100.00	1,100,000,000	1,076,554,788	97.87
36	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	120	Sekolah	120	Sekolah	100.00	458,775,675	239,011,975	52.10
37	Terlaksananya Revitalisasi SMA	2	Sekolah	0	Sekolah	0.00	2,658,039,600	30,000,000	1.13
38	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA	12	Sekolah	0	Sekolah	0.00	5,775,835,400	335,344,300	5.81
39	Terlaksananya Pengadaan Media Pembelajaran SMA	4	Sekolah	4	Sekolah	100.00	13,336,840,000	1,339,766,100	10.05
40	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMA	100	Orang	100	Orang	100.00	557,391,450	408,907,800	73.36
41	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustakawan SMA	60	Orang	60	Orang	100.00	402,446,300	383,646,400	95.33
42	Terlaksananya Rehabilitasi SMA/SMK	7	Sekolah	5	Sekolah	71.43	1,035,742,400	955,721,100	92.27
43	Terlaksananya Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	250	Orang	250	Orang	100.00	1,173,547,000	987,799,553	84.17
44	Terlaksananya Diklat Calon Pengawas dan Sertifikat Pengawas SMA	40	Orang	40	Orang	100.00	576,850,000	472,771,200	81.96
45	Terlaksananya Pelatihan Guru Bimbingan Konseling SMA	90	Orang	90	Orang	100.00	400,000,000	353,273,500	88.32

No.	Sasaran	Target		Realisasi Target		Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
46	Terlaksananya MGMP Guru Mata Pelajaran SMA	200	Orang	200	Orang	100.00	791,426,500	721,919,700	91.22
47	Terlaksananya Biaya Operasional Peningkatan Mutu Pendidikan/BOS Daerah	12	Kab/Kota	12	Kab/Kota	100.00	240,080,867,400	238,827,044,412	99.48
48	Terlaksananya Diklat Kepala Sekolah SMA	60	Orang	60	Orang	100.00	573,969,900	465,164,100	81.04
49	Terlaksananya Pembangunan Pagar SMA	7	Sekolah	7	Sekolah	100.00	1,727,585,200	1,645,160,100	95.23
50	Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur SMA	19	Sekolah	12	Sekolah	63.16	6,474,140,000	3,036,882,226	46.91
51	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor IPA SMA	4	Sekolah	0	Sekolah	0.00	2,229,160,160	12,800,000	0.57
52	Terlaksananya Pembangunan USB SMA Dan Kelengkapanya	1	Sekolah	0	Sekolah	0.00	24,000,000,000	14,200,000	0.06
53	Terlaksananya Pengadaan Mebeluer Sekolah SMA	14	Sekolah	14	Sekolah	100.00	2,500,000,000	2,108,157,400	84.33
54	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMA (DAK)	103	Sekolah	103	Sekolah	100.00	28,593,954,000	28,120,428,095	98.34
55	Terlaksananya Kualifikasi S2 Terakreditasi	127	Orang	100	Orang	78.74	5,630,299,950	3,794,141,350	67.39
56	Terlaksananya Implementasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Serta Pelaporan BOS Se-Provinsi Riau	12	Kab/Kota	12	Kab/Kota	100.00	1,053,288,200	1,003,331,240	95.26
57	Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK	12	Kab/Kota	12	Kab/Kota	100.00	978,376,600	352,648,400	36.04
58	Terlaksananya Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	12	Kab/Kota	12	Kab/Kota	100.00	242,634,600,000	282,363,496,444	116.37
59	Terlaksananya Kegiatan DAK Non Fisik Affirmasi (DAK)	12	Kab/Kota	0	Kab/Kota	0.00	106,245,000,000	3,041,633,990	2.86
60	Terlaksananya Kegiatan DAK Non Fisik Kinerja (DAK)	12	Kab/Kota	0	Kab/Kota	0.00	40,283,451,000	60,978,200	0.15
BIDANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)							**166,285,358,210**	**125,203,482,934**	**75.29**
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							**6,052,334,100**	**4,412,201,682**	**72.90**
61	Terlaksananya Diklat Kepala Sekolah SMK	160	Orang	148	Orang	92.50	700,000,000	572,035,942	81.72
62	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	192	Orang	192	Orang	100.00	1,994,000,000	1,573,412,700	78.91
63	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	288	Orang	288	Orang	100.00	1,500,000,000	1,263,421,800	84.23

No.	Sasaran	Target		Realisasi Target		Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
64	Terlaksananya Lomba Kompetensi Siswa SMK (LKS)	225	Orang	170	Orang	75.56	1,858,334,100	1,003,331,240	53.99
Program Pendidikan Menengah							**160,233,024,110**	**120,791,281,252**	**75.38**
65	Terlaksananya Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK	1	Sekolah	1	Sekolah	100.00	3,846,247,000	21,182,600	0.55
66	Terlaksananya Pengadaan Media Pembelajaran SMK	9	Sekolah	9	Sekolah	100.00	14,553,000,000	4,749,591,698	32.64
67	Terlaksananya Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK	120	Orang	120	Orang	100.00	413,700,400	368,104,600	88.98
68	Terlaksananya Penyelenggaraan SMK 4 Tahun	8	Program Keahlian	0	Program Keahlian	0.00	852,446,200	32,460,800	3.81
69	Terlaksananya Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK	5000	Siswa	5000	Siswa	100.00	268,848,400	117,481,300	43.70
70	Terlaksananya Bimtek Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMK	120	Orang/Guru	120	Orang/Guru	100.00	358,178,000	314,415,900	87.78
71	Terlaksananya MGMP Guru Mata Pelajaran SMK	120	Orang	120	Orang	100.00	435,923,500	353,209,700	81.03
72	Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Tata Kelola Administrasi SMK	120	Orang	120	Orang	100.00	327,494,000	290,654,000	88.75
73	Terlaksananya Sertifikasi ANT IV dan ATT IV Siswa Nautika dan Teknika	133	Siswa	100	Siswa	75.19	2,566,833,500	1,094,225,842	42.63
74	Terlaksananya Pendidikan Alih Profesi Guru Adatif Menjadi Guru Produktif Kerjasama Dengan UNRI/UIN/UNAND/UNP	24	Orang/Guru	0	Orang/Guru	0.00	1,000,000,000	14,800,000	1.48
75	Terlaksananya Peningkatan Infrastruktur SMK	12	Sekolah	6	Sekolah	50.00	6,081,000,000	2,826,360,650	46.48
76	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan SMK	2	Sekolah	0	Sekolah	0.00	862,418,500	91,227,600	10.58
77	Terlaksananya Pengadaan Meubiler Sekolah SMK	9	Sekolah	9	Sekolah	100.00	5,293,489,800	4,097,083,700	77.40
78	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran Praktek Produktif SMK	6	Sekolah	6	Sekolah	100.00	4,926,300,000	4,392,090,933	89.16
79	Terlaksananya Pengadaan Alat Labor SMK	4	Sekolah	0	Sekolah	0.00	2,671,984,300	47,970,500	1.80
80	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMK	3	Sekolah	0	Sekolah	0.00	4,015,668,600	193,758,800	4.83

No.	Sasaran	Target		Realisasi Target		Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
81	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Perlengkapannya	3	Sekolah	0	Sekolah	0.00	2,546,659,310	125,603,900	4.93
82	Terlaksananya Pembangunan Auditorium SMK/Gedung Serbaguna SMK	2	Sekolah	0	Sekolah	0.00	1,250,000,000	104,912,000	8.39
83	Terlaksananya Sertifikasi Keahlian Bagi Siswa Tidak Mampu dan Berprestasi	180	Orang	180	Orang	100.00	1,750,000,000	1,526,515,200	87.23
84	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMK (DAK)	119	Sekolah	117	Sekolah	98.32	94,644,469,000	90,289,821,356	95.40
85	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	1	Sekolah	1	Sekolah	100.00	7,107,403,000	6,231,909,918	87.68
86	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	1	Sekolah	1	Sekolah	100.00	4,460,960,600	3,507,900,255	78.64
BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS							**44,392,524,000**	**39,064,127,999**	**88.00**
Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus							**44,392,524,000**	**39,064,127,999**	**88.00**
87	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SLB (DAK)	25	Sekolah	25	Sekolah	100.00	7,446,529,000	7,223,685,898	97.01
88	Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB	100	Sekolah	100	Sekolah	100.00	568,555,300	426,775,100	75.06
89	Terlaksananya Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK	350	Orang	350	Orang	100.00	2,269,995,400	2,142,242,300	94.37
90	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Layanan Autis	1	Tahun	1	Tahun	100.00	1,275,250,000	1,242,935,200	97.47
91	Terlaksananya Rehabiltasi Sarana dan Prasarana PKPLK	12	Sekolah	11	Sekolah	91.67	1,500,000,000	1,338,893,600	89.26
92	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Pendidikan PKPLK	4	Sekolah	4	Sekolah	100.00	1,259,000,000	1,178,337,316	93.59
93	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	300	Orang	300	Orang	100.00	6,553,129,000	5,403,453,585	82.46
94	Pengadaan Meubiler PKPLK	11	Sekolah	0	Sekolah	0.00	1,324,400,000	18,273,000	1.38
95	Terlaksananya Festival Inovasi Dan Kreatifitas PKPLK	65	Orang	65	Orang	100.00	769,447,800	650,208,400	84.50

No.	Sasaran	Target		Realisasi Target		Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
96	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan SMAN Plus Provinsi Riau	399	Orang	399	Orang	100.00	6,042,300,000	5,141,305,700	85.09
97	Terlaksananya Persiapan dan Penyelenggaraan Sekolah Terbuka Pendidikan Jarak Jauh	4	TKB	4	TKB	100.00	768,196,800	585,441,300	76.21
98	Terlaksananya Penyelenggaraan Penunjang Layanan Mutu Pendidikan PKPLK	10	SLBN	10	SLBN	100.00	2,671,273,600	2,493,110,800	93.33
99	Terlaksananya Penyelenggaraan SMA Pintar	222	Orang	222	Orang	100.00	4,837,836,000	4,290,051,400	88.68
100	Terlaksananya Pendidikan Parenting Bagi Masyarakat	122	Orang	122	Orang	100.00	300,000,000	235,015,500	78.34
101	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PKPLK	204	Orang	204	Orang	100.00	5,526,991,000	5,355,641,000	96.90
102	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Bagi Daerah 3T dan KAT Provinsi Riau	12	Kab/Kota	12	Kab/Kota	100.00	231,812,500	187,116,300	80.72
103	Terlaksananya Apresiasi GTK Paud DIKMAS dan Guru Berpretasi Serta Berdedikasi Se-Provinsi Riau	13	Cabang Lomba	13	Cabang Lomba	100.00	827,807,600	975,941,600	117.89
104	Terlaksananya Diklat Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB)	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100.00	220,000,000	175,700,000	79.86
BIDANG PENDATAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN							**55,291,782,700**	**37,992,105,056**	**68.71**
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							**54,791,782,700**	**37,992,105,056**	**69.34**
105	Terlaksananya Festival Lomba Seni Nasional (FLS2N) SMP	5	Cabang Lomba	5	Cabang Lomba	100.00	1,034,104,000	919,287,548	88.90
106	Terlaksananya Festival Lomba Seni Nasional (FLS2N) SD	5	Cabang Lomba	5	Cabang Lomba	100.00	833,372,800	709,416,000	85.13
107	Terlaksananya Olimpiade Guru Nasional (OGN) Provinsi Riau	36	Orang	36	Orang	100.00	150,000,000	75,837,000	50.56
108	Terlaksananya Meningkatkan Kapasitas Dewan Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota	13	Orang	13	Orang	100.00	924,689,600	815,344,100	88.17
109	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	2	Cabang Lomba	2	Cabang Lomba	100.00	899,525,000	745,455,900	82.87
110	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	144	Orang	144	Orang	100.00	1,170,998,000	1,063,109,876	90.79
111	Terlaksananya Pengelolaan Data Pendidikan	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00	1,386,813,700	1,083,926,750	78.16

No.	Sasaran	Target		Realisasi Target		Capaian Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
112	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	5	Cabang Lomba	5	Cabang Lomba	100.00	922,710,700	766,649,998	83.09
113	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	6	Cabang Lomba	6	Cabang Lomba	100.00	869,400,800	727,910,700	83.73
114	Terlaksananya Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi dalam Provinsi Riau	7	Perguruan Tinggi	6	Perguruan Tinggi	85.71	27,209,733,600	18,803,746,600	69.11
115	Terlaksananya Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	5	Perguruan Tinggi	3	Perguruan Tinggi	60.00	10,390,434,500	5,078,650,584	48.88
116	Terlaksananya Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	6	Perguruan Tinggi	6	Perguruan Tinggi	100.00	9,000,000,000	7,202,770,000	80.03
Program Pendidikan Menengah							**500,000,000**	**-**	**0.00**
107	Terlaksananya PPDB On Line SMA/SMK	111	Sekolah	0	Sekolah	0.00%	500,000,000	0	0.00